

# **LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023**

**BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI  
PANGKALPINANG**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengawas Obat di Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 25 Juli 2023  
Plt. Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt  
NIP. 19840528 200712 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	50
Lampiran 1 Neraca	
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran	
Lampiran 3 Laporan Operasional	
Lampiran 4 Laporan Perubahan Ekuitas	
Lampiran 5 Neraca Percobaan Akrual	
Lampiran 6 Neraca Percobaan Kas	
Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara	
Lampiran 9 Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2023	
Lampiran 10 Laporan Posisi BMN di Neraca Per 30 Juni 2023	

Lampiran 11 Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2023

Lampiran 12 Berita Acara Stock Opname Persediaan Per 30 Juni 2023

Lampiran 13 Berita Acara Serah Terima dari P3OMN

Lampiran 14 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Lampiran 15 Surat Hasil Rekonsiliasi

Lampiran 16 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Lampiran 17 Surat Setoran Pengembalian

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria Kualitas Piutang .....	14
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap .....	18
Tabel 3	Capaian Output .....	20
Tabel 4	Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023 .....	22
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi dan Pendapatan .....	22
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022 .....	22
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 .....	24
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 .....	24
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 .....	25
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 .....	26
Tabel 11	Rincian Pengembalian Belanja Barang 30 Juni 2023 .....	26
Tabel 12	Rincian Belanja Barang untuk penanganan pandemic covid 19 .....	27
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 .....	27
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 .....	28
Tabel 15	Rincian Belanja Modal TA 2023 dan 2022 .....	28
Tabel 16	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022 .....	29
Tabel 17	Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022 .....	30
Tabel 18	Rincian Barang 521211 .....	30
Tabel 19	Rincian Mutasi Tanah .....	31

Tabel 20	Rincian Tanah	.....	31
Tabel 21	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	.....	32
Tabel 22	Rincian pembelian penambahan peralatan dan mesin	.....	33
Tabel 23	Rincian BMN rusak parah	.....	34
Tabel 24	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	.....	35
Tabel 25	Rincian Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan	.....	35
Tabel 26	Rincian Mutasi Aset Tetap lainnya	.....	36
Tabel 27	Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan	.....	37
Tabel 28	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	.....	37
Tabel 29	Rincian utang kepada pihak ketiga	.....	38
Tabel 30	Rincian utang belum ditagihkan	.....	39
Tabel 31	Rincian PNBPN	.....	40
Tabel 32	Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022	.....	41
Tabel 33	Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022	.....	41
Tabel 34	Rincian Beban Barang Dan Jasa 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022	-----	41
Tabel 35	Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022	-----	42
Tabel 36	Rincian Beban Perjalanan dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022	-----	43
Tabel 37	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022	-----	43
Tabel 38	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	-----	44
Tabel 39	Rincian Nilai Transaksi antar Entitas	-----	47
Tabel 40	Rincian DDEL/DKEL	-----	47

Tabel 41 Transfer masuk PPPOMN Per ----- 48  
30 Juni 2023

Tabel 42 Capaian output strategis PN ----- 51

## **BALAI POM DI PANGKALPINANG**

---

### PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang semester I Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 25 Juli 2023  
Plt. Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt  
NIP. 19840528 200712 1 001

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan untuk Periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp146.445.311,00 atau mencapai 78.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp187.760.000,00.

Realisasi Belanja untuk Periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp7.909.981.547,00 atau mencapai 48.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.470.120.000,00.

**2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.662.778.578,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.885.858.488,00 dan Aset Tetap (netto) sebesar Rp17.776.920.090,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp511.676.457,00 dan Rp19.151.102.121,00.

**3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp142.270.000,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp9.425.990.866,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp9.283.720.866,00 Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar

Rp41.138.153,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp9.324.859.019,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp20.796.781.616,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp9.324.859.019,00 ditambah dengan koreksi – koreksi sebesar Rp112.858.726,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp7.792.038.250,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp19.151.102.121,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis Akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2023				30 Juni 2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (Di Bawah)	%	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	187.760.000	146.445.311	-41.314.689	78,00	138.430.513
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>187.760.000</b>	<b>146.445.311</b>	<b>-41.314.689</b>	<b>78,00</b>	<b>138.430.513</b>
<b>BELANJA</b>	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	6.375.000.000	3.192.327.040	3.182.672.960	50,08	2.801.221.275
Belanja Barang	B.4	9.917.120.000	4.539.655.662	-5.377.464.338	46,00	2.992.494.914
Belanja Modal	B.5	178.000.000	177.998.845	1.155	100,00	412.047.818
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>16.470.120.000</b>	<b>7.909.981.547</b>	<b>8.560.138.453</b>	<b>48,00</b>	<b>6.205.764.007</b>

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Plt. Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt

NIP. 19840528 200712 1 001

## II. NERACA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG  
NERACA

PER 30 JUNI 2023 dan DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>		
Kas Dibendahara Pengeluaran	<b>C.1.1.</b>	120,000,000.	0
Persediaan	<b>C.1.2.</b>	1,765.858.488	1,670,507,659
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>1,885,858,488.</b>	<b>1,670,507,659</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	<b>C.2.1</b>	3,202,708,111.	3,202,708,111
Peralatan dan Mesin	<b>C.2.2</b>	51,361,557,053.	51,725,053,208
Gedung dan Bangunan	<b>C.2.3</b>	7,684,866,250.	7,684,866,250
Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>C.2.4</b>	132,668,710.	132,668,710
Aset Tetap Lainnya	<b>C.2.5</b>	58,912,300.	58,912,300
Konstruksi Dalam Pengerjaan	<b>C.2.6</b>	20,900,000.	20,900,000
AKUMULASI PENYUSUTAN	<b>C.2.7</b>	(44,684,692,334.)	(43,650,736,591)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>17,776,920,090.</b>	<b>19,174,371,988</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>19,662,778,578.</b>	<b>20,844,879,647</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.3</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	<b>C.3.1</b>	303,175,095.	48,098,031
Utang Yang Belum Ditagihkan	<b>C.3.2</b>	88,501,362.	0
Uang Muka dari KPPN	<b>C.3.3</b>	120,000,000.	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>511,676,457.</b>	<b>48,098,031</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>511,676,657.</b>	<b>48,098,031</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	<b>C.4</b>	19,151,102,121.	20,796,781,616
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>19,151,102,121.</b>	<b>20,796,781,616</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>19,151,102,121.</b>	<b>20,796,781,616</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>19,662,778,578</b>	<b>20,844,879,647</b>

Pangkalpinang, 25 Juli 2023  
Plt. Kepala Balai POM di PangkalpinangAndhika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt  
NIP. 19840528 200712 1 001

## III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	<b>D.1</b>	142,270,000.	138,220,000.
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>		<b>142,270,000.</b>	<b>138,220,000.</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>142,270,000.</b>	<b>138,220,000.</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	<b>D.2</b>	3,384,109,950.	3,291,341,058.
Beban Persediaan	<b>D.3</b>	681,710,336.	421,071,662.
Beban Barang dan Jasa	<b>D.4</b>	1,993,601,354.	1,985,240,798.
Beban Pemeliharaan	<b>D.5</b>	681,583,130.	400,735,836.
Beban Perjalanan Dinas	<b>D.6</b>	1,266,097,853.	718,682,429.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	<b>D.7</b>	1,418,888,243.	1,489,871,142.
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>9,425,990,866</b>	<b>8,306,942,925.</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(9,283,720,866)</b>	<b>(8,168,722,925.)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.8</b>		
<b>SURPLUS/DEFISIT PELEPASAM ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		3,699,999.	0.
		3,699,999.	0.
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		(44,838,152.)	(132,563,733.)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		22,780,128.	210,513.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		67,618,280.	132,774,246.
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(41,138,153.)</b>	<b>(132,563,733.)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		(9,324,859,019)	(8,301,286,658.)
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(9,324,859,019)</b>	<b>(8,301,286,658.)</b>

Pangkalpinang, 25 Juli 2023  
Plt. Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt  
NIP. 19840528 200712 1 001

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>E.1</b>	<b>20.796.781.616</b>	<b>24.300.691.933</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>E.2</b>	(9.324.507.219)	(8.301.286.858)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>E.3</b>	<b>(112.858.726)</b>	0
Koreksi Nilai Persediaan	<b>E.3.1</b>	<b>43.703.774</b>	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	<b>E.3.2</b>	(156.562.500)	0
<b>JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI ENTITAS</b>		(156.562.500)	0
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>E.4</b>	7.792.038.250	5.453.187.661
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>E.5</b>	(1.645.679.495)	(2.848.099.197)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>19.151.102.121</b>	<b>21.452.592.736</b>

Pangkalpinang, 25 Juli 2023  
Plt. Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt  
NIP. 19840528 200712 1 001

## A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

#### **Pasal 33**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

#### **Pasal 34**

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

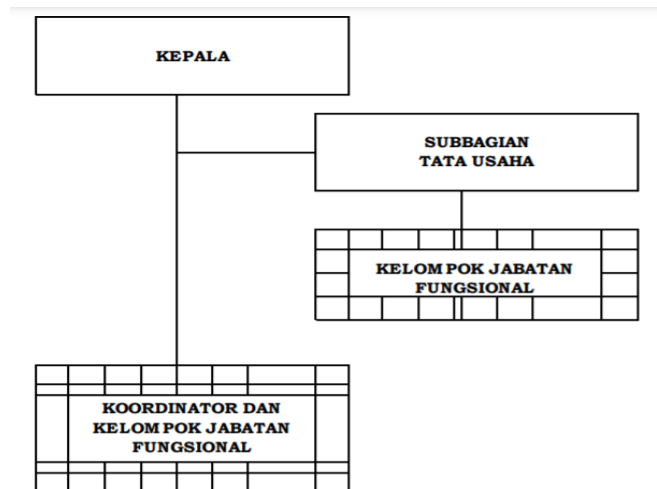
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan
- e. distribusi Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- j. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- l. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



Rencana strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis,

kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

**Visi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang 2020-2024**

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

**Misi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang 2020-2024**

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

## **A.3. Basis Akuntansi**

*Basis Akuntansi*

Balai POM di Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjaditanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

*Dasar  
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai POM di Pangkalpinang dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan POM sesuai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

**(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan – LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

- Pendapatan Sewa Rumah Dinas
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

- **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Kriteria Kualitas Piutang**

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tuntutan Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan merupakan aset yang berupa:
  1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
    - ✓ Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding;
    - ✓ Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*); dan
    - ✓ Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
  2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh : bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
  3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
  4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam

satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
  - ✓ Harga pembelian;
  - ✓ Biaya pengangkutan;
  - ✓ Biaya penanganan;
  - ✓ Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
  - ✓ Potongan harga;
  - ✓ Rabat dan lainnya yang serupa.
  - ✓ Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 5 Akuntansi Persediaan.

- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
  - a) Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
    - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang;
    - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan;
    - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih dalam keadaan baik.
  - b) Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
    - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang;
    - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
  - c) Pengeluaran yang nilainya tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi

yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dankas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 240/KM.6/2022

tentang Perubahan Kedua Atas KMK 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

## Laporan Keuangan Semester I Balai POM di Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023

### Ekuitas

### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### Capaian Output Strategis

#### A.6. Capaian Output Strategis

Selama periode 30 Juni 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang sebagai berikut :

Tabel 3  
Capaian Output Strategis Bulan Juni 2023

No	Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi sd Juni	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran sd Juni	Progress Capaian Output
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 135.709.000,00	Rp 42.238.020,00	31,12%	14	7	50,00%
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 110.689.000,00	Rp 26.488.800,00	23,93%	183	189	103,28%
3	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 426.380.000,00	Rp 235.761.761,00	55,29%	1	0,54	54,00%
4	BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 145.313.000,00	Rp 62.968.250,00	43,33%	31	15	48,39%
5	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 100.000.000,00	Rp 99.998.845,00	100,00%	1	1	100,00%
6	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 78.000.000,00	Rp 78.000.000,00	100,00%	10	10	100,00%
7	EBA.962	Layanan Umum	Rp 348.604.000,00	Rp 158.143.105,00	45,36%	1	0,50	50,00%
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 1.957.786.000,00	Rp 887.266.475,00	45,32%	1	0,55	55,00%
9	QCD.U66	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	Rp 198.200.000,00	Rp 77.457.000,00	39,08%	2	1	50,00%
10	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Rp 757.848.000,00	Rp 368.613.019,00	48,64%	64	55%	55,00%
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	Rp 930.041.000,00	Rp 362.600.580,00	38,99%	24	40%	40,00%
12	QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	Rp 227.905.000,00	Rp 117.985.844,00	51,77%	8	55%	55,00%
13	QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp 339.300.000,00	Rp 186.302.756,00	54,91%	1131	613	54,20%
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 35.500.000,00	Rp 23.880.000,00	67,27%	10	5	50,00%
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 196.587.000,00	Rp 19.525.410,00	9,93%	194	108	55,67%
16	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp 488.665.000,00	Rp 300.304.030,00	61,45%	814	415	50,98%
17	QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	Rp 43.079.000,00	Rp 28.689.700,00	66,60%	65	55	84,62%
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 68.051.000,00	Rp 23.617.000,00	34,70%	38	22	57,89%
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 969.100.000,00	Rp 378.745.021,00	39,08%	442	270	61,09%
20	EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 8.913.363.000,00	Rp 4.432.652.121,00	49,73%	1	0,49	49,00%
	TOTAL		Rp 16.470.120.000,00	Rp 7.911.237.737,00	48,03%			

## **B. Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Balai POM di Pangkalpinang memperoleh alokasi anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp16.470.120.000 Selama Semester I Tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA awal yang disebabkan adanya Recofusing dan realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Balai POM di Pangkalpinang selama tahun anggaran 2023 telah melakukan 7 kali revisi anggaran. Berikut daftar revisi:

1. Revisi I.

Tanggal 28 Desember 2022, terdapat revisi untuk automatic adjusment.

2. Revisi II.

Tanggal 20 Januari 2023, perubahan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan rencana penarikan dana (halaman III DIPA)

3. Revisi III.

Tanggal 15 Februari 2023, perubahan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan rencana penarikan dana (halaman III DIPA)

4. Revisi IV.

Tanggal 27 Maret 2023, perubahan rencana penarikan dana (halaman III DIPA)

5. Revisi V.

Tanggal 17 April 2023, terdapat revisi untuk automatic adjusment tahap kedua dengan sebesar Rp.2.332.305.077,00.

6. Revisi VI.

Tanggal 25 Mei 2023, terdapat revisi Perubahan Halaman 3 DIPA, Pemutakhiran data hasil revisi POK.

7. Revisi VII.

Tanggal 18 Juni 2023, Pemutakhiran data hasil revisi POK.

Anggaran awal dan anggaran revisi dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 4  
Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

Uraian	TA 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	187.760.000	187.760.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>187.760.000</b>	<b>187.760.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	6.375.000.000	6.375.000.000
Belanja Barang	9.917.120.000	9.917.120.000
Belanja Modal	178.000.000	178.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.470.120.000</b>	<b>16.470.120.000</b>

Pendapatan  
Rp146.445.311,00.

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 sebesar Rp146.445.331,00 atau 78% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp187.760.000,00. Pendapatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terdiri dari Pendapatan Jasa, Pendapatan Lain-lain, dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  
(dalam Rupiah)

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi 30 Juni 2023	%
Pendapatan Jasa	187.760.000	142.270.000	-22%
Pendapatan Lain-lain		475.312	100%
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		3.699.999	100%
<b>Jumlah</b>	<b>187.760.000</b>	<b>146.445.311</b>	<b>78%</b>

Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2023 dan 2022  
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	142.270.000	138.220.000	103%
Pendapatan Lain-lain	475.312	210.513	226%
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	3.699.999	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b>146.445.311</b>	<b>138.430.513</b>	<b>106%</b>

- Realisasi pendapatan jasa Balai POM di Pangkalpinang untuk periode 30 Juni 2023 sebesar Rp142.270.000,00 yang berasal dari jasa pengujian sampel pihak ketiga.
- Realisasi pendapatan lain-lain Balai POM di Pangkalpinang untuk periode 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp475.312,00 dan Rp210.513,00 yang mengalami kenaikan sebesar 125,79%, dikarenakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu Semester I Tahun 2023 lebih besar dibandingkan Semester I Tahun 2022. Adapun rincian pendapatan lain-lain Balai POM di Pangkalpinang sebagai berikut:
  - ✓ Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp475.312,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut :
    - Kelebihan tunjangan kinerja bulan Desember 2022 sebesar Rp105.312,00 dengan nomor NTPN 2262861QUQ94HG9K.
    - Pengembalian belanja pegawai berupa kelebihan tunjangan umum sebesar Rp370.000,00 atas nama Riantika Kurniati dengan nomor SP2D 230151302000888.
- Realisasi pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya Balai POM di pangkalpinang untuk periode 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp3.699.999,00 dan Rp0. hal tersebut terjadi karena hasil lelang pemusnahan BMN rusak berat sesuai dengan risalah lelang nomor 4/16/2023 tanggal 18 Januari 2023, dengan nomor NTPN:4DCA548VV5404LQM tanggal 20 Januari 2023.

*Belanja*  
*Rp7.909.981.547,00.*

## **B.2 Belanja**

Realisasi Belanja Balai POM di Pangkalpinang yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp7.909.981.547,00 atau 48,03 % dari anggaran belanja sebesar Rp16.470.120.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.375.000.000	3.192.327.514	50,08
Belanja Barang	9.917.120.000	4.540.911.378	45,79
Belanja Modal	178.000.000	177.998.845	100,00
Belanja Kotor	<b>16.470.120.000</b>	<b>7.911.237.737</b>	<b>48,03</b>
Pengembalian		1.256.190	
<b>Jumlah</b>	<b>16.470.120.000</b>	<b>7.909.981.547</b>	<b>48,03</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 27,46% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 13,96% dari Semester I Tahun 2022 disebabkan karena CPNS Tahun 2022 sejumlah 6 orang telah diangkat menjadi PNS dan mendapat tunjangan fungsional. Kenaikan pangkat dan jabatan beberapa pegawai serta Gaji ke-13 dan Tukin ke-13 sudah dicairkan pada bulan Juni 2023.
- b. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar 51,70% dikarenakan kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai RPD Bulanan dan status pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19 telah dicabut maka kegiatan KIE, Pemeriksaan dan Serifikasi, Penindakan dan pertemuan terpadu Badan POM dapat dilaksanakan secara maksimal.
- c. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (56,80%) dikarenakan belanja modal Tahun 2023 sebesar 178.000.000,00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp412.047.818,00. Realisasi pencairan pada periode 30 Juni 2022 lebih besar dikarenakan tahun 2022 anggaran belanja modal lebih besar dikarenakan untuk melakukan pembelian alat laboratorium.

Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi		NAIK (TURUN) %
	30 Juni 2023	30 Juni 2022	
Belanja Pegawai	3.192.327.040	2.801.221.275	13,96%
Belanja Barang	4.539.655.662	2.992.494.914	51,70%
Belanja Modal	177.998.845	412.047.818	-56,80%
<b>Jumlah</b>	<b>7.909.981.547</b>	<b>6.205.764.007</b>	<b>27,46%</b>

Belanja Pegawai  
Rp3.192.327.040,00

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.192.327.040 dan Rp2.801.221.275.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja yang berakhir 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,96 persen dari per 30 Juni 2022. Hal ini karena CPNS Tahun 2022 telah diangkat menjadi PNS dan mereka sudah mendapat tunjangan fungsional. Kenaikan pangkat dan jabatan beberapa pegawai serta Gaji ke-13 dan Tukin ke-13 sudah dicairkan pada bulan Juni 2023. Berikut tabel perbandingan realisasi 30 Juni tahun 2023 dengan 2022:

Tabel 9  
Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI per 30 Juni 2023	REALISASI per 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.655.325.519	1.452.952.821	13,93
Belanja Lembur	30.188.000	14.773.000	104,35
Belanja Tunjangan Khusus	1.506.813.995	1.334.590.483	12,90
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.192.327.514</b>	<b>2.802.316.304</b>	13,92
Pengembalian Belanja Pegawai	(474)	(1.095.029)	(99,96)
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>3.192.327.040</b>	<b>2.801.221.275</b>	13,96

Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp474 berupa pembulatan pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai.

- Pengembalian belanja pegawai dari pembulatan kekurangan gaji bulan maret-april 2023 sebanyak 6 pegawai a.n Riska Widiyana dkk sebesar Rp48,00 SP2D nomor 230151302002407.
- Pengembalian belanja pegawai dari pembulatan kekurangan gaji bulan april 2023 sebanyak 11 pegawai a.n Ria Emeilia dkk sebesar Rp126,00 SP2D nomor 230151302002406.

- Pengembalian belanja pegawai dari pembulatan kekurangan gaji tunjangan fungsional bulan april 2023 sebanyak 4 pegawai a.n Silvia Anggraini dkk sebesar Rp300,00 SP2D nomor 230151302002405.

Belanja Barang  
Rp4.539.655.662,00

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.539.655.662,00 dan Rp2.992.494.914. Realisasi belanja barang untuk periode 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 51,70 % dari realisasi belanja barang periode 30 Juni 2022. Hal ini antara lain dikarenakan kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai RPD Bulanan dan status pembatasan kegiatan kerana pandemi covid-19 telah dicabut maka kegiatan KIE, pemeriksaan dan sertifikasi, Penindakan dan pertemuan terpadu Badan POM dapat dilaksanakan secara maksimal. Berikut tabel realisasi belanja barang pada 30 Juni 2023 dan 2022:

Tabel 10  
Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	603.381.338	641.923.307	-6,00%
Belanja Barang Non Operasional	862.296.034	642.969.488	34,11%
Belanja Barang Persediaan	992.016.355	287.290.195	245,30%
Belanja Jasa	504.657.828	557.703.684	-9,51%
Belanja Pemeliharaan	333.228.254	189.860.811	75,51%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.245.331.569	673.527.960	84,90%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.540.911.378</b>	<b>2.993.275.445</b>	51,70%
Pengembalian Belanja	(1.255.716)	(780.531)	60,88%
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>4.539.655.662</b>	<b>2.992.494.914</b>	51,70%

Pengembalian belanja barang sebesar Rp1.255.716,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11  
Rincian Pengembalian Belanja Barang 30 Juni 2023

No	Uraian	NTPN	Tanggal	Nilai
1	Pengembalian perjalanan dinas a.n Terry dan Marruni, SPM No 122	1BB831GAB6SEQN6R	31 Maret 2023	203.620
2	Pengembalian perjalanan dinas a.n Angela dkk (3 Org)	91CDD520AH20DF9J	22-Feb-23	924.096
3	Pengembalian perjalanan dinas a.n Indita dkk (4 org)	DC4141GAB71OST9P	11 Maret 2023	128.000
		Jumlah		1.255.716

Berikut rincian belanja barang untuk penanganan pandemic Covid 19 sampai dengan 30 Juni 2023:

Tabel 12  
Rincian Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Sampai dengan 30 Juni 2023

Daftar Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 sampai dengan 30 Juni 2023							
Kode Output	Kode Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	(%)	Keterangan
3165	EBA	521131	Belanja Barang Operasional	Rp6.446.000	Rp6.444.500	99,98	Pembelian Masker dan Hand Sanitizer
Total Belanja Penanganan Pandemi Covid 19				Rp6.446.000	Rp6.444.500	99,98%	

Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemic covid 19 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp6.444.500,00 atau 99,98% dari total pagu, atas belanja dengan akun covid ini akan dilakukan revisi pada Semester II menunggu revisi.

*Belanja Modal*  
Rp177.998.845,00

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp177.998.845,00 dan Rp412.047.818,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar (56,80%) dikarenakan belanja modal Tahun 2023 sebesar 178.000.000,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.295.204.000,00. Jika dilihat pencairan belanja modal Tahun 2023 telah mencapai 100%. Perbandingan realisasi belanja modal yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 sebagai berikut:

Tabel 13  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.998.845	340.673.818	-47,75%
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan	0	71.374.000	-100,00%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>177.998.845</b>	<b>412.047.818</b>	<b>-56,80%</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>177.998.845</b>	<b>412.047.818</b>	<b>-56,80</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp177.998.845,00.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp177.998.845,00 dan Rp340.673.818,00 mengalami penurunan sebesar (47,75%). Hal ini belanja modal Tahun 2023 sebesar 178.000.000,00. dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp5.295.204.000,00.

Tabel 14  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.998.845	340.673.818	-47,75
Jumlah Belanja kotor	177.998.845	340.673.818	-47,75
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.998.845	340.673.818	-47,75

Berikut terlampir tabel rincian belanja modal peralatan dan mesin TA 2023:

Tabel 15  
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	Pompa Air	1	2.983.120
2	Meja Kerja Besi/Metal	2	3.000.000
3	Meja Kerja Kayu	6	22.350.000
4	Kursi Besi/Metal	26	38.920.000
5	Sice	2	13.200.000
6	Meja Resepsionis	1	7.008.000
7	A.C. Split	1	6.138.725
8	Mesin Pengering Tangan	1	1.819.000
9	Microphone/Wireless MIC	1	2.180.000
10	Telephone Mobile	1	6.398.000
11	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	1	2.400.000
12	Note Book	3	53.080.000
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	13.007.000
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.515.000
Total		52	177.998.845

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Aset Lancar*  
*Rp1.885.858.488,00.*

C.1 Aset Lancar

Jumlah aset lancar Balai POM di Pangkalpinang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.885.858.488,00 dan Rp1.670.507.659. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara Pengeluaran*  
*Rp.120.000.000,00.*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Balai POM di Pangkalpinang menggunakan Bank Mandiri atas nama BPG 015 8100126728421000. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

Keterangan	30 juni 2023	31 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran Kas Tunai	30.043.996	0
Kuitansi Uang Persediaan	0	0
Bendahara Pengeluaran di Bank	89.956.004	0
<b>Jumlah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>

*Persediaan*  
*Rp1.765.858.488,00*

C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.765.858.488,00 dan

Rp1.670.507.659,00. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil stock opname fisik barang dengan Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.10.10A.10A5.06.23.383A Tanggal 30 Juni 2023. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

*Tabel 17  
Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022*

*(dalam rupiah)*

<b>PERSEDIAAN</b>	<b>30-Jun-23</b>	<b>31-Dec-22</b>
Barang Konsumsi	192.610.185	209.891.623,00
Barang untuk Pemeliharaan	0	707.992,00
Suku Cadang	759.808.057	748.649.598,00
Bahan Baku	813.440.246	711.258.446,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.765.858.488</b>	<b>1.670.507.659,00</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat persediaan dalam kondisi usang sejumlah 23 botol, berita acara persediaan reagensia usang PL.03.10.10A.10A5.06.23.383C dengan nilai total senilai Rp 40.242.280,00 sebagaimana terlampir.

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama Badan POM Tanggal 9 Februari 2021 Nomor : PL.03.01.2.25.02.21.39 Perihal Penatausahaan BMN, dimana untuk barang yang dibeli dengan Mata Anggaran Keuangan (MAK) belanja 521211 dan masih terdapat sisa di akhir periode pelaporan, yaitu 30 Juni 2023, maka untuk barang sisa tersebut dilakukan stock Opname dan input di aplikasi Persediaan. Barang - barang tersebut akan digunakan untuk operasional perkantoran selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari:

*Tabel 18  
Rincian Barang 521211 Per 30 Juni 2023*

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Qty</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	GOODIE BAG KIE	222	49.950	11.088.900
2	BLOCKNOTE GKPD, PJAS, KIE	322	16.650	5.361.300
3	BALLPOINT GKPD,PJAS,KIE	887	5.550	4.922.850
4	POUCH	140	38.850	5.439.000
5	PLAKAT	1	600.000	600.000
6	BANTAL LEHER	38	57.165	2.172.270
7	BOTOL MINUM	90	43.290	3.896.100
<b>Total</b>		<b>1700</b>		<b>33.480.420</b>

Aset Tetap  
Rp17.776.920.090,00

## C.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap kantor Balai POM di Pangkalpinang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.776.920.090,00 dan Rp19.174.371.988,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 Bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada Balai POM di Pangkalpinang berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah  
Rp3.202.708.111,00

### C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp3.202.708.111 dan Rp3.202.708.111. Dari jumlah/nilai tanah di atas, tidak terdapat jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tidak ada tanah sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada Aset Tetap tanah.

Tabel 19  
Rincian Mutasi Tanah

(Dalam rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>3.202.708.111</b>
Mutasi tambah :	-
Mutasi kurang :	-
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>3.202.708.111</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>	<b>3.202.708.111</b>

Tabel 20  
Rincian Tanah TA 2023

(Dalam rupiah)

No	Uraian	Luas	Lokasi	Status Sertifikasi	Jenis Sertifi	Pemegang Hak	Nomor Sertifikat	Nilai
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2094m <sup>2</sup>	Komplek Perkantoran Peprov. Kepulauan Bangka Belitung, Jln. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Bersertifikat	SHP	Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan	No.23/HP/BPN-29.04/2015	Rp3.183.258.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3432m <sup>2</sup>	Komplek Perkantoran Peprov. Kepulauan Bangka Belitung, Jln. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Bersertifikat	SHP	Bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan	No.11/HP/BPN-29.04/2016	Rp19.450.111

Peralatan dan Mesin  
Rp51.361.557.053,00

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai POM di Pangkalpinang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp51.361.557.053,00 dan Rp51.725.053.208,00.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp51.725.053.208</b>
Mutasi tambah :		<b>Rp348.525.445</b>
Pembelian	Rp177.998.845	
Reklasifikasi Masuk	Rp3.526.600	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp167.000.000	
Mutasi Kurang :		<b>Rp712.021.600</b>
Reklasifikasi Keluar	Rp3.526.600	
Koreksi Pencatatan	Rp167.000.000	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp541.495.000	
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>		<b>Rp51.361.557.053</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023		Rp43.597.344.189
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>		<b>Rp7.764.212.864</b>

#### Mutasi Tambah

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp348.525.445,00 yang terdiri dari pembelian, reklasifikasi masuk, koreksi pencatatan nilai bertambah, penggunaan BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebagai berikut:

- **Pembelian**

Pembelian penambahan peralatan dan mesin senilai Rp177.998.845,00. Rincian Pembelian penambahan peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 22  
Rincian Pembelian Penambahan Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	Pompa Air	1	2.983.120
2	Meja Kerja Besi/Metal	2	3.000.000
3	Meja Kerja Kayu	6	22.350.000
4	Kursi Besi/Metal	26	38.920.000
5	Sice	2	13.200.000
6	Meja Resepsionis	1	7.008.000
7	A.C. Split	1	6.138.725
8	Mesin Pengering Tangan	1	1.819.000
9	Microphone/Wireless MIC	1	2.180.000
10	Telephone Mobile	1	6.398.000
11	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	1	2.400.000
12	Note Book	3	53.080.000
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	13.007.000
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.515.000
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>177.998.845</b>

- **Reklasifikasi Masuk**

Berdasarkan Surat Keterangan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk dari Kepala Balai POM di Pangkalpinang Nomor: PL.03.01.10A.10A5.06.23.96 tanggal 23 Juni 2023 terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk yang dilakukan akibat kesalahan pencatatan pada kode barang sebanyak 4 unit senilai Rp3.526.600,00 berupa trolley.

- **Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah**

Berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Perubahan Nilai/Kualitas BMN nomor : B-PL.03.01.10A.10A5.2.23.342 tanggal 3 Februari 2023 terdapat transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah untuk penambahan nilai peralatan Balai POM di Pangkalpinang dengan input transaksi koreksi perubahan nilai bertambah pada Gas Chromatograph (GC) berupa 1 unit Autosampler Tray, 150 Vial for GC senilai Rp167.000.000,00.

**Transaksi mutasi kurang peralatan dan mesin senilai Rp712.021.600,00 berupa:**

- **Reklasifikasi Keluar**

Berdasarkan Surat Keterangan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk dari Kepala Balai POM di Pangkalpinang Nomor: PL.03.01.10A.10A5.06.23.96

tanggal 23 Juni 2023 terdapat transaksi Reklasifikasi Masuk yang dilakukan akibat kesalahan pencatatan pada kode barang sebanyak 4 unit senilai Rp3.526.600,00 berupa trolley.

- Koreksi Pencatatan

Berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Perubahan Nilai/Kualitas BMN dari Kepala Balai POM di Pangkalpinang Nomor : B-PL.03.01.10A.10A5.2.23.342 tanggal 3 Februari 2023 terdapat transaksi Koreksi Pencatatan yang dilakukan akibat kesalahan penginputan pada Modul Komitmen yang menyebabkan penambahan Aset sebanyak 1 unit pada Alat Gas Chromatograph (GC) senilai Rp167.000.000,00.

- Penghentian Aset Dari Penggunaan

Berdasarkan Surat Perubahan Kondisi Barang Milik Negara dari Kepala Balai POM di Pangkalpinang Nomor : PL.03.01.10A.10A5.05.23.83 tanggal 29 Mei 2023 telah diajukan perubahan kondisi menjadi Barang Milik Negara dengan status rusak berat dan dihentikan penggunaannya sebanyak 2 unit senilai Rp541.495.000,00.

*Tabel 23  
Rincian Barang Milik Negara dengan status rusak berat dan dihentikan penggunaannya*

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Kode barang	NUP	Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Satuan Barang	No. Polisi	Harga Perolehan (Rupiah)
1	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Suzuki APV GXMT Arena	3020102003	1	2008	2008	1	Unit	BN 1529 PZ	Rp142.850.000
2	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	Isuzu Elf	3020105999	1	2013	2013	1	Unit	BN 7001 PZ	Rp398.645.000
<b>Jumlah</b>										<b>Rp541.495.000</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp7.684.866.250,00

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.684.866.250 dan Rp7.684.866.250. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada periode ini. per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 24  
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>7.684.866.250</b>
Mutasi Tambah:	-	-
Mutasi Kurang:	-	-
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>		<b>7.684.866.250</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023		1.053.652.740
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>		<b>6.631.213.510</b>

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp132.668.710,00.

### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp132.668.710 dan Rp132.668.710. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada periode ini per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25  
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp 132.668.710</b>
Mutasi tambah :	-	Rp -
Mutasi Kurang :	-	Rp -
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>		<b>Rp 132.668.710</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023		Rp (33.695.405)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>		<b>Rp 98.973.305</b>

Aset Tetap Lainnya  
Rp58.912.300

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya

per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp58.912.300 dan Rp58.912.300 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 26  
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>58.912.300</b>
Mutasi Tambah :	-	-
Mutasi Kurang :	-	-
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>		<b>58.912.300</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023		-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>		<b>58.912.300</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Rp20.900.000

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.900.000,00 dan Rp20.900.000,00 yang merupakan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi dalam Rangka Peningkatan BSL 2 BPOM di Pangkalpinang. Tidak terdapat mutasi KDP selama periode Semester I Tahun 2023. Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kontrak Fisik
  1. Nama Kontraktor : Hari Madya Susanto, SE
  2. Nilai Kontrak Awal : Rp20.900.000,00
  3. Nomor Kontrak : B-PL.02.03.10A.10A5.05.22.113
  4. Tanggal Kontrak : 17 Mei 2022
  5. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender
  6. Nilai Kontrak Addendum (Jika ada) : -
  7. Nomor Kontrak Addendum : -
  8. Tanggal Kontrak Addendum : -
  9. Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum (Jika ada) : -
  10. Tingkat Penyelesaian Pekerjaan : 100%

Tabel 27  
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	2022	2023
	Saldo Awal 1 Januari	0	20.900.000
<b>A</b>	<b>Tahap Perencanaan</b>		<b>0</b>
1	Jasa Konsultan Perencana	20.900.000	
2	Jasa Konsultan Amdal/UKL_UPL		
<b>B</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>		<b>0</b>
1	Uang Muka		
2	Pekerjaan fisik konstruksi		
3	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi		
<b>C</b>	<b>Biaya Pendukung</b>		<b>0</b>
1	Honorarium ( Tim pendukung/teknis, narasumber, panitia	0	
2	Perjalanan Dinas	0	
	<b>Mutasi Tambah</b>	20.900.000	0
11	Koreksi Pencatatan Nilai BMN	0	
a.	Pengembalian Belanja Modal		
	<b>Mutasi Kurang</b>	0	0
	<b>Total Mutasi</b>	<b>20.900.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>20.900.000</b>	<b>20.900.000</b>

Akumulasi  
Penyusutan  
Rp(44.684.692.334)

### C.2.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp(44.684.692.334,00) dan Rp(43.650.736.591,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 28  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(Dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	51.361.557.053	43.597.344.189	7.764.212.864
2	Gedung dan Bangunan	7.684.866.250	1.053.652.740	6.631.213.510
3	Irigasi	48.430.000	8.423.796	40.006.204
4	Jaringan	84.238.710	25.271.609	58.967.101
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>59.179.092.013</b>	<b>44.684.692.334</b>	<b>14.494.399.679</b>

Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp509.775.757,00.

### C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai POM di Pangkalpinang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp509.775.757,00 dan Rp48.098.031,00.

*Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp303.175.095,00.*

### C.3.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp303.175.095 dan Rp616.983.283 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai POM di Pangkalpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 29  
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 30 Juni 2023

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	191.782.910	Gaji Induk Bulan Juli 2023
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	55.285.185	Honor PPNPN Bulan Juni 2023
	52.444.000	Termin I Pengadaan Pendukung Pengujian
	3.663.000	Perbaikan Instalasi Jaringan CCTV
<b>Jumlah</b>	<b>303.175.095</b>	

*Utang Yang Belum Ditagihkan  
Rp88.149.562,00*

### C.3.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp88.501.362. dan Rp0. Terdapat kuitansi-kuitansi di bulan Juni yang sudah masuk ke PPK dan telah dibuatkan SPBy tetapi belum dipertanggungjawabkan dalam SPP GUP sebesar Rp88.501.362,00. Utang yang belum ditagihkan ini merupakan transaksi Balai POM di Pangkalpinang yang dibayarkan melalui pembayaran secara LS dan GUP (RM, PNPB, dan KKP)

Tabel 30  
Rincian Utang yang Belum di Tagihkan

Kode Kegiatan	Kode KRO	Jumlah	Keterangan
6384 dan 3165	EBA	Rp32.188.900	SPBY/SPBY yang belum SPP
3165	QIC	Rp21.264.300	
3165	BMB	Rp620.000	
3165	QCD	Rp2.850.000	
3165	QDB	Rp49.000	
3165	QDC	Rp1.500.000	
3165	BKB	Rp4.847.000	
3165	PDD	Rp24.830.362	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp88.149.562</b>	

Uang Muka dari KPPN  
Rp120.000.000,00

### C.3.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas  
Rp20.645.557.493

### C.4 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.796.781.616,00 dan Rp24.300.691.933,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan PNB*  
*Rp146.445.311,00*

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp142.270.000,00 dan Rp138.220.000,00. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak satker Balai POM di Pangkalpinang senilai Rp146.445.311,00 dapat dijelaskan sebagai berikut berikut:

*Tabel 31*  
*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak*  
*30 Juni 2023 dan 2022*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	142.270.000	138.220.000	2,93%
<b>Jumlah</b>	<b>142.270.000</b>	<b>138.220.000</b>	<b>2,93%</b>

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan senilai Rp142.270.000,00. bersumber dari pendapatan jasa pengujian sampel pihak ketiga.

*Beban Pegawai*  
*Rp3.384.109.950,00*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.384.109.950,00 dan Rp3.291.341.058,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai sebagai berikut:

Tabel 32  
Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.367.666.380	1.364.795.780	0,21
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.194	26.496	-8,69
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	57.930.280	55.396.460	4,57
Beban Tunj. Anak PNS	17.331.146	14.402.462	20,33
Beban Tunj. Struktural PNS	16.200.000	21.600.000	-25,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	168.654.000	136.793.000	23,29
Beban Tunj. PPh PNS	704.315	847.807	-16,93
Beban Tunj. Beras PNS	64.598.640	62.490.480	3,37
Beban Uang Makan PNS	135.684.000	137.736.000	-1,49
Beban Tunj. Umum PNS	18.315.000	24.155.000	-24,18
Beban Uang Lembur	30.188.000	14.773.000	0,00
Beban Pegawai(Tunjangan Khusus)	1.506.813.995	1.458.324.573	3,33
<b>Jumlah</b>	<b>3.384.109.950</b>	<b>3.291.341.058</b>	<b>2,819</b>

Beban Persediaan  
Rp681.710.336,00

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp681.710.336,00 dan Rp421.071.662,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33  
Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	256.665.250	98.863.105	160%
Beban Persediaan Bahan Baku	425.045.086	322.208.557	32%
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>681.710.336</b>	<b>421.071.662</b>	<b>62%</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp1.993.601.354,00

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.993.601.354,00 dan Rp1.985.240.798,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Tabel 34  
Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Naik /turun
Beban Keperluan Perkantoran	485.003.873,	449.139.374	7,99%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	46.543.230,	46.044.223	1,08%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.351.000,	7.594.100	9,97%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70.780.000,	132.744.000	-46,68%
Beban Barang Operasional Lainnya	43.408.820,	54.884.000	-20,91%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.444.500,	14.728.800	-56,25%
Beban Bahan	647.787.334,	628.385.438	3,09%
Beban Honor Output Kegiatan	22.600.000,	19.800.000	14,14%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	181.622.750,	66.164.500	174,50%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,	26.997.550	0,00%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16.146.050,	0	0,00%
Beban Langganan Listrik	209.482.056,	179.897.826	16,45%
Beban Langganan Telepon	4.377.029,	4.280.341	2,26%
Beban Sewa	112.813.000,	180.740.000	-37,58%
Beban Jasa Profesi	37.700.000,	18.950.000	98,94%
Beban Jasa Lainnya	100.541.712,	152.865.646	-34,23%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,	2.025.000	-100,00%
<b>Total</b>	<b>1.993.601.354</b>	<b>1.985.240.798</b>	<b>0,42%</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp681.583.130,00

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp681.583.130,00 dan Rp400.735.836,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35  
Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169.307.590	25.472.050	564,68
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182.088.100	169.106.729	7,68
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	791.992	307.000	157,98
Beban Persediaan Suku Cadang	329.395.448	205.850.057	60,02
<b>Jumlah</b>	<b>681.583.130</b>	<b>400.735.836</b>	<b>70,08</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp1.266.097.853

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp1.266.097.853,00 dan Rp718.682.429,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi,

dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36  
Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	663.718.268	385.181.039	72,31
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.650.000	43.969.987	31,11
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	162.251.024	37.925.000	327,82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	383.734.277	252.386.934	52,04
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-1.052.096	-132.000	697,04
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	-450.000	-100,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-203.620	-198.531	2,56
<b>Jumlah</b>	<b>1.266.097.853</b>	<b>718.682.429</b>	<b>76,17</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp1.418.888.243,00

#### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.418.888.243,00 dan Rp1.489.871.142,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
30 Juni 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.328.319.336	1.399.745.234
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.813.940	88.370.941
Beban Penyusutan Irigasi	701.983	701.983
Beban Penyusutan jaringan	1.052.984	1.052.984
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.418.888.243</b>	<b>1.489.871.142</b>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
Rp(41.138.153,00)

#### D.8 Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus atau deficit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus / Defisit dari

Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp(41.138.153,00) dan Rp(132.563.733,00). Rincian Defisit kegiatan non operasional dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

*Tabel 38  
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
30 Juni 2023 dan 2022*

URAIAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.699.999	0	0,00
Beban pelepasan aset non lancar	0	0	0,00
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>3.699.999</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	475.312	513	100,00
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	0	210.000	100,00
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	22.304.816	0	100,00
<b>Jumlah pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya</b>	<b>22.780.128</b>	<b>210.513</b>	<b>10721,25</b>
Beban dari kegiatan Non Operasional Lain			
Beban penyesuaian nilai persediaan	27.376.000	0	0,00
Kerugian persediaan rusak/usang	40.242.280	132.774.246	0,00
<b>Jumlah Beban dari kegiatan Non Operasional Lain</b>	<b>67.618.280</b>	<b>132.774.246</b>	<b>-49,07</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>-44.838.152</b>	<b>-132.563.733</b>	<b>-66,18</b>
<b>Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>-41.138.153</b>	<b>-132.563.733</b>	<b>-68,97</b>

1. Pendapatan pelepasan aset non lancar senilai Rp3.699.999,00 disebabkan dari penjualan aset non lancar berupa paket barang inventaris dengan kondisi rusak berat sebanyak 69 unit sesuai dengan risalah lelang nomor 4/16/2023 tanggal 18 januari 2023, dengan nomor NTPN:4DCA548VV5404LQM tanggal 20 Januari 2023.
2. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp475.312,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Pengembalian belanja pegawai sebesar sebesar Rp105.312 dan kelebihan tunjangan umum nomor SPM 00103 sebesar Rp370.000,00.
3. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan Rp22.304.816,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Koreksi nilai tambah sebesar Rp21.756.000,00 untuk pengadaan gas laboratorium, nomor SPM 00193 tgl 24 Maret 2023.

- b. Koreksi nilai tambah Rp548.816,00 untuk kesalahan input komitmen alat tulis kantor.
4. Beban dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp.27.376.000. dengan rincian:
  - a. Beban penyesuaian nilai persediaan kuitansi senilai Rp5.620.000,00 berasal dari koreksi kuantitas kurang atas barang persediaan dikarenakan kesalahan input pada modul komitmen dengan nomor berita acara serah terima 00230 tanggal 21 Juni 2023.
  - b. Beban penyesuaian nilai persediaan senilai Rp21.756.000,00 berasal dari koreksi kuantitas kurang pengadaan barang berupa tabung gas, dengan nomor berita acara serah terima barang pengadaan nomor kuitansi 095/SII/III/2023 tanggal dokumen 24 Maret 2023
5. Kerugian persediaan rusak/using senilai Rp40.242.280,00. Beban persediaan rusak/usang sejumlah 23 buah data terlampir.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp20.796.781.616*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp20.796.781.616,00 dan Rp24.300.691.933,00.

*Defisit LO*  
*(Rp9.324.859.019)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp9.324.859.019,00) dan (Rp8.301.286.658,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang Mengurangi Ekuitas*  
*(Rp112.858.726)*

### **E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Koreksi yang mengurangi ekuitas untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar (Rp112.858.726,00) dan Rp0.

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp43.703.774,00 dengan rincian saldo awal Rp33.946.580,00 dan koreksi kuantitas tambah Rp9.757.194,00.

#### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar (Rp156.562.500,00) dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap yang bukan karena revaluasi nilai, berdasarkan

Surat Keterangan Koreksi Perubahan Nilai/Kualitas BMN dari Kepala Balai POM di Pangkalpinang Nomor : B-PL.03.01.10A.10A5.2.23.342 tanggal 3 Februari 2023 terdapat transaksi Koreksi Pencatatan yang dilakukan akibat kesalahan penginputan pada Modul Komitmen yang menyebabkan penambahan Aset sebanyak 1 unit pada Alat Gas Chromatograph (GC) senilai Rp167.000.000,00.

*Transaksi Antar Entitas  
Rp7.792.038.250*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp7.792.038.250,00 dan Rp6.075.132.943,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari :

Tabel 39  
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  
per 30 Juni 2023 dan 2022

Jenis Transaksi	30-Jun-23	30-Jun-22
Ditagihkan ke entitas lain	7.909.981.547	6.205.764.007
Diterima dari entitas lain	(146.445.311)	(138.430.513)
Transfer Masuk	28.502.014	7.799.449
<b>Jumlah</b>	<b>7.792.038.250</b>	<b>6.075.132.943</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Diterima dari Entitas  
Lain (DDEL)/ Ditagihkan  
ke  
Entitas Lain (DKEL)  
(Rp146.445.311,00) /  
Rp7.792.038.250,00.*

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp146.445.311,00 sedangkan DKEL sebesar Rp7.792.038.250,00.

Tabel 40  
Rincian DDEL/DKEL

Transaksi Antar Entitas	Nilai
<b>Diterima dari entitas lain</b>	
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan	142.270.000
Pendapatan Lain-lain	475.312
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	3.699.999
<b>Jumlah DDEL</b>	<b>146.445.311</b>
<b>Ditagihkan ke entitas lain</b>	
Realisasi Belanja Pegawai	3.192.327.040
Realisasi Belanja Barang	4.539.655.662
Realisasi Belanja Modal	177.998.845
<b>Jumlah DKEL</b>	<b>7.909.981.547</b>

*Transfer  
Masuk/Transfer Keluar  
Rp31.673.160,00/  
Rp2.774.655.867.00*

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp28.502.014,00 terdiri dari persediaan bahan baku dari PPPOMN dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 41  
Transfer masuk PPPOMN Per 30 Juni 2023*

No.	No. BAST	Tanggal	Jumlah (vial)	Nilai (Rp.)
1	PP.03.02.10.105.01.23.014A	17/01/2023	58	Rp12.843.121
2	PP.03.02.10.105.01.23.014B	17/01/2023	4	Rp856.410
3	PP.03.02.10.105.03.23.125A	24/03/2023	3	Rp1.327.829
4	PP.03.02.10.105.03.23.103A	03/03/2023	42	Rp10.467.976
5	T-PP.05.02.10.104.02.23.048A	07/02/2023	8	Rp498.280
6	T-PP.03.02.10.105.05.23.197A	29/05/2023	6	Rp608.276
7	T-PP.03.02.10.105.06.23.209A	07/06/2023	6	Rp1.900.122
	<b>Total</b>		127	Rp28.502.014

*Ekuitas Akhir  
Rp20.796.781.616,  
00*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp19.151.102.121.000 dan Rp21.452.592.936,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

**F.1 Pengungkapan Lain-lain**

Selama periode berjalan tidak terdapat perubahan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen, pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Balai POM di Pangkalpinang tahun anggaran 2023. SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.02.10A.10A5.09.22.393 tanggal 19 September 2021, SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor HK.02.02.10A.10A5.12.22.518 tanggal 14 Desember 2022, SK Pejabat Penandatanganan SPM HK.02.02.10A.10A5.12.22.519 tanggal 14 Desember 2022, SK Bendahara Pengeluaran HK.02.02.10A.10A5.12.22.520 tanggal 15 Desember 2022. Berikut daftar nama susunan pejabat yang mengelola keuangan tahun anggaran 2023 Balai POM di Pangkalpinang:

1	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si.
2	Pejabat Pembuat Komitmen I	:	Andhika Achmad Sugiarto S.Farm.,Apt.
3	Pejabat Pembuat Komitmen II	:	Netty Desi Margaretta Manullang, S.E
4	Pejabat Penandatanganan SPM	:	Ria Emeilia, S. Farm, Apt.
5	Bendahara Pengeluaran	:	Desy Anindyasari, A.Md.

**F.1.2 Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang adalah Rekening Mandiri Cabang Mandiri Cab. Pangkalpinang dengan Nomor Rekening VA 810012672842100 a.n. BPG 015 Balai POM di Pangkalpinang

N o	Nomor Rekening	Nama Bank	Nama Rekening	NPWP
1	810012672842100	Mandiri Cab. Pangkalpinang	BPG 015 Balai POM Pangkalpinang	00119.522.1.304.000

### **F.1.3 Alat Gelas Kualitatif**

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorium namun belum digunakan sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Balai POM di Pangkalpinang per 30 Juni 2023 adalah sejumlah 19.538 unit, dengan rincian terlampir.

### **F.1.4 Barang Bukti**

Bahwa dalam melaksanakan fungsinya Badan POM melakukan proses penyidikan dibidang obat dan makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini terkait barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di bidang pengadilan. Barang Bukti yang di dapat Balai POM di Pangkalpinang per 30 Juni 2023 adalah Tidak Ada.

### **F.1.5 Prioritas Nasional Tahun 2023**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Balai POM di Pangkalpinang terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi

## Laporan Keuangan Semester I Balai POM di Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023

Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada Balai POM di Pangkalpinang sebagai berikut:

- a. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Pelaksanaannya diantaranya melalui 12 program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai **Rp6.212.062.000** dan realisasi sebesar **Rp 2.774.986.835** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42  
Capaian Output Strategis Prioritas Nasional  
30 Juni 2023

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis
Balai POM di Pangkalpinang	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp196.587.000	Rp19.525.410	9,93	Produk	194	108,0
	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PIAS) aman	Rp757.848.000	Rp368.613.019	48,64	Lembaga	64	0,0
	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp969.100.000	Rp378.745.021	39,08	Lembaga	442	270,0
	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp35.500.000	Rp23.880.000	67,27	UMKM	10	5,0
	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp488.665.000	Rp300.304.030	61,45	Produk	814	415,0
	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp339.300.000	Rp186.302.756	54,91	Orang	1131	613,0
	Pasar aman dari bahan berbahaya	Rp227.905.000	Rp117.985.844	51,77	Lembaga	8	0,0
	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	Rp43.079.000	Rp28.689.700	66,6	Produk	65	55,0
	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp1.957.786.000	Rp887.266.475	45,32	Lembaga	1	0,6
	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp68.051.000	Rp23.617.000	34,7	Lembaga	38	22,0
	Desa Pangan Aman	Rp930.041.000	Rp362.600.580	38,99	Lembaga	24	0,0
	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	Rp198.200.000	Rp77.457.000	39,08	Perkara	2	1,0
	<b>Total</b>		<b>Rp6.212.062.000</b>	<b>Rp2.774.986.835</b>			